

B u l e t i n



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA

KETUA
Evaluasi Total
Kasus
Jual Beli
Pulau

Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan

KORPOLKAM
Dibahas Setelah
RUU KUHP
Rampung

Nomor 1349/IV/VI/2025 Juni 2025



9 772614 339005



Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan



FOTO: MUN/PDT

Tim Komisi XII DPR RI meninjau langsung bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha serta didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo Kota Jambi, Jambi, Kamis (19/06/2025).

Komisi XII DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo Kota Jambi, dalam rangka melihat implementasi teknologi pengelolaan sampah modern berbasis *Sanitary Landfill*. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dan sejumlah anggota Komisi XII DPR RI, serta disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha serta didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi.

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, menyampaikan bahwa sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA Talang Gulo patut diapresiasi karena sudah meninggalkan metode *open dumping* yang masih banyak digunakan di daerah lain.

“Banyak daerah di Indonesia

masih menggunakan sistem *open dumping* yang berdampak buruk bagi lingkungan. TPA Talang Gulo menjadi salah satu dari sedikit yang telah menerapkan *Sanitary Landfill*, sebuah sistem yang jauh lebih ramah lingkungan dan

berkelanjutan. Karena itu, kami datang untuk melihat langsung bagaimana sistem ini dijalankan,” ujar Fasha di sela-sela tinjauan di TPA Talang Gulo Kota Jambi, Jambi, Kamis (19/6).

Ia menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI akan mendorong setiap provinsi di Indonesia agar memiliki minimal satu TPA dengan sistem *Sanitary Landfill*, demi menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menyoroti tantangan kapasitas pengolahan sampah di Kota Jambi yang belum seimbang dengan volume sampah harian yang dihasilkan.

“Tadi saya tanyakan ke kepala dinas ESDM-nya, di Jambi ini hampir 400 ton per hari, sedangkan sampah yang diolah itu nggak sampai 10 ton per hari. Ini problem ke depan kalau tidak ada penambahan kapasitas dari proses ini, apalagi tumpukan sampah bertambah sangat cepat,” kata Cek Endra. **mun/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Evaluasi Total Kasus Jual Beli Pulau



FOTO: DPR/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Sidang Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terkait isu jual beli pulau yang belakangan kembali mencuat dan meresahkan publik. Puan menyoroti pentingnya penataan ulang administrasi pulau-pulau di Indonesia guna mencegah penyalahgunaan atau alih fungsi kawasan pulau secara ilegal.

Hal ini disampaikannya usai membuka Sidang Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

“Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali. Bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau, kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi

dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia,” tegas Puan.

Ia menambahkan, DPR telah meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi guna memastikan semua pulau di Indonesia tercatat dengan jelas secara administratif, serta tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia, jangan sampai apa adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. **we/rdn**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puritno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmien Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moernopoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjannah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dibahas Setelah RUU KUHAP Rampung

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dilakukan setelah rampungnya pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini disampaikan Dasco menanggapi perkembangan legislasi yang saat ini tengah berlangsung di Komisi III DPR RI.

“Betul begitu.

Pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Menurut Dasco, hal ini penting karena materi tentang perampasan aset tidak

hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tetapi tersebar di berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga KUHAP. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh

DPR adalah menyelesaikan terlebih dahulu RUU yang berkaitan, agar pengaturan dalam RUU Perampasan Aset dapat dikompilasi secara menyeluruh dan harmonis.

“Karena aspek-aspek perampasan aset itu ada di Undang-Undang Tipikor, TPPU, KUHP, dan KUHAP, maka setelah selesai semua, kita akan ambil dari situ. Bagaimana kemudian satu undang-undang yang punya persoalan yang sama soal aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai

RUU Perampasan Aset sendiri telah menjadi sorotan publik sejak awal wacana pembahasannya. Pemerintah dan sebagian kalangan DPR menilai RUU ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang selama ini sulit dilakukan karena pelaku sering kali kabur atau meninggal dunia sebelum kasus diputus pengadilan.

rdn

Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: DOK/PDT

Prioritaskan Pembahasan 8 RUU

DPR RI memasuki Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (24/6/2025). Pada masa sidang ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR akan

RUU *carry over* dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya.

Dalam upaya pembentukan undang-undang, DPR RI menekankan pentingnya membangun komunikasi dan mencari titik temu dengan berbagai pihak berkepentingan. Hal ini krusial

untuk memastikan bahwa perspektif semua pihak terakomodasi demi kepentingan nasional.

“Perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat menjadi mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan undang-undang,” jelas Puan, dalam Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (24/6).

Adapun daftar delapan RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat



Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (24/6/2025).

fokus dan intensif membahas delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I.

Dari jumlah tersebut, tiga RUU merupakan usulan DPR RI, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU daftar kumulatif terbuka. Tujuh diantaranya merupakan

Perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat menjadi mencari titik temu bagi kepentingan nasional

I, antara lain: RUU tentang Kepariwisata (carry over); RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (carry over); RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (carry over).

— bia/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pembangunan nasional bukan hanya membangun gedung-gedung, bendungan, jalan dan pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, pembangunan nasional harus menyediakan pelayanan bagi rakyat, mengatur kehidupan rakyat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan religius, membangun sumber daya manusia, mengelola lingkungan hidup, menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan lain sebagainya.

Puan pun menekankan keberhasilan pembangunan nasional harus dapat dirasakan

oleh rakyat. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan negara, fasilitas yang semakin maju, rasa nyaman dan tentram dalam beraktivitas, serta kemampuan rakyat untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Intinya, rakyat harus merasakan bahwa negara hadir untuk menjadikan hidup mereka lebih baik.

"DPR RI dan pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat," kata Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga secara khusus memberikan apresiasi atas respons cepat pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dua permasalahan krusial yang terjadi baru-baru ini. Yakni permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

"Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. **— bia/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



APBN 2026 Harus Adaptif

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (24/6), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Puan mengatakan DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 serta RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

DPR RI menyadari bahwa perekonomian global tahun depan diproyeksikan akan tetap

dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geo-ekonomi, dan kondisi ekonomi global yang tidak kondusif diprediksi akan sangat memengaruhi rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 harus mampu mengantisipasi dampak tersebut terhadap kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional. "KEM-PPKF

tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis," kata Puan.

Sementara itu, pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 akan difokuskan pada efektivitas pencapaian dan efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi dari pelaksanaan APBN 2024 akan menjadi dasar untuk menyempurnakan APBN di tahun-tahun berikutnya.

"DPR RI akan mencermati dengan seksama agar kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam APBN selalu memenuhi prinsip tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," tegasnya.

— bia/aha



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (24/6/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua DPR RI Puan Maharani saat pidato pembukaan Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Memasuki Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI akan fokus pada pembahasan berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada, DPR RI akan membahas berbagai isu bersama mitra kerja terkait, diantaranya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja; permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, dan penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lalu, permasalahan ojek online; pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang

Komitmen Tangani Masalah Rakyat

sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi. "Pada masa sidang ini, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian bertujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik antara lain diikuti Gubernur BI dan anggota dewan komisioner LPS," jelas Puan, dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Sementara itu, pada fungsi diplomasi, DPR RI akan terus menjalankan fungsi diplomasi

yang diarahkan untuk membangun hubungan kerja sama antar parlemen. "Kegiatan diplomasi tersebut berperan penting dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia," imbuhnya.

Pada masa sidang ini DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi dari beberapa negara antara lain duta besar dari Ekuador, Afrika Selatan, Cyprus dan delegasi Belanda. Adapun kunjungan Delegasi Indonesia akan dilakukan ke negara Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, belarus, Cina, dan Jepang. **— bia/aha**



Ancaman Blokade Hormuz, Perlu Mitigasi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta negara-negara sahabat untuk bersama mendorong perdamaian antara Iran dan Israel yang masih terus berperang. Ia juga mewanti-wanti terhadap ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang bisa berdampak terhadap Indonesia. Meski Indonesia menganut prinsip bebas aktif, Puan menyebut Indonesia harus mengambil peran turut serta menciptakan perdamaian dunia mengingat perang Iran-Israel telah banyak memakan korban dari warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.

“Tentu saja kami menghimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan damai. Karena akan menyebabkan yang paling menjadi

korban adalah masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Puan menilai, negara lain juga harus menahan diri untuk tidak ikut campur dan memperkeruh suasana agar konflik Timur Tengah tersebut tidak berkepanjangan. Sebab perang akan berdampak langsung pada stabilitas kawasan yang memicu kegelisahan pasar global dan memperburuk krisis kemanusiaan.

“Apa yang akan terjadi kalau kemudian itu terus berkepanjangan. Tentu saja, sebaiknya kedua belah pihak menahan diri. Begitu

juga negara-negara lain untuk menghimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana,” sebut Puan.

Guna mengantisipasi dampak perang Iran dan Israel terhadap situasi nasional, Puan mengatakan DPR RI bersama Pemerintah akan segera membahasnya. **— we/aha**

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (24/6/2025).



FOTO: DEP/PTT

Proaktif Menjembatani Aspirasi Masyarakat



FOTO: MRO/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa saat memimpin Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menyiapkan berbagai skenario guna merespons beragam isu aktual yang tengah ramai di masyarakat, hingga di media sosial. “BAM harus menyiapkan berbagai skenario bagaimana menanggapi isu-isu yang memang sedang ramai,” kata Saan kepada *Parlementaria* se usai memimpin Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

BAM DPR RI juga harus untuk menyiapkan skenario dalam merespons aspirasi masyarakat di daerah-daerah, hingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan mendatangi DPR RI.

“Bahkan, mereka yang meminta waktu lewat mekanisme, misalnya mengirim surat dan sebagainya, semua ini harus direspons dengan baik dan juga harus diperjuangkan semaksimal mungkin,” ujar Saan.

Sebab itu, Saan mengingatkan agar BAM harus dapat bekerja secara proaktif dalam menjembatani aspirasi masyarakat guna menghadirkan solusi bagi penyelesaiannya. “Tidak hanya menunggu, tidak hanya melihat, tetapi juga harus lebih proaktif, harus bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan, terus juga menyerap, menampung, dan menyalurkan ke komisi-komisi terkait,” tuturnya.

Saan berharap Ketua BAM DPR RI yang baru, Ahmad Heryawan, dapat melanjutkan kinerja baik yang telah dicapai oleh Ketua BAM terdahulu, Netty Prasetyani Heryawan. Sebagaimana yang diketahui, Ahmad Heryawan resmi ditetapkan sebagai Ketua BAM DPR RI dalam Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI. Ia sebelumnya menduduki posisi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, kini menggantikan posisi Ketua BAM DPR RI yang sebelumnya dijabat oleh Netty Prasetyani Heryawan. **— rdn**



Scan QR untuk berita selengkapannya



Sukamta Jadi Wakil Ketua Komisi I

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi I DPR RI resmi

menetapkan Sukamta sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Ahmad Heryawan (Aher).

“Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 293 tertanggal 23 Juni 2025, perihal Perubahan Penugasan Alat Kelengkapan Dewan. Maka Pimpinan Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS mengalami perubahan yang

semula dari Dr. H. Ahmad Heryawan, digantikan Saudara Dr. H. Sukamta,” ujar Dasco saat memimpin rapat di Gedung Nusantara II, Senayan,

Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 293 tertanggal 23 Juni 2025, perihal Perubahan Penugasan Alat Kelengkapan Dewan.

Jakarta, Kamis (26/06).

Selaku pimpinan rapat, Dasco menanyakan kepada seluruh anggota Komisi I terkait persetujuan penetapan Sukamta sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. “Apakah Saudara Dr. H. Sukamta dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI?” tanyanya kepada forum.

Seluruh anggota Komisi I menyatakan setuju. Dengan persetujuan tersebut, susunan Pimpinan Komisi I DPR RI saat ini adalah Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dari Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua I DPR RI Budisatrio Djiwandono, B.A. dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dr. H. Sukamta, Ph.D dari Fraksi PKS, dan H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. dari Fraksi Partai Demokrat.

gal/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad resmi menetapkan Dr. H. Sukamta sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, menggantikan Dr. H. Ahmad Heryawan dalam Rapat Komisi I di Gedung Nusantara II, Kamis (26/06/2025).

Dorong Gencatan Senjata dan Evakuasi WNI

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyampaikan pandangan strategis terkait dampak perang Iran-Israel dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi. Ia menegaskan bahwa meskipun konflik ini hanya berlangsung 12 hari, namun telah mengguncang stabilitas global secara signifikan.

“Perang yang hanya berjalan dua belas hari ini dimulai dengan Iran, *show off* dari kepemilikannya dalam persenjataan. Israel terlihat tergopoh-gopoh menangkai rudal dari Iran, lalu diintervensi oleh bom ke tiga tempat oleh Amerika,

hingga akhirnya membungkam perang itu sendiri,” ujarnya dalam forum diskusi tersebut di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan,

Dampak konflik ini tidak hanya dirasakan oleh Iran dan Israel, tetapi juga oleh banyak negara lainnya, yang mencakup dimensi geopolitik, identitas etnis, hingga potensi instabilitas regional dan global.

Jakarta, Kamis (26/6).

Nurul Arifin menekankan bahwa dampak konflik ini tidak hanya dirasakan oleh Iran dan Israel, tetapi juga oleh banyak negara lainnya, yang mencakup dimensi geopolitik, identitas etnis, hingga potensi instabilitas regional dan global. Ia menyebut bahwa lonjakan harga energi sempat terjadi, namun dapat diintervensi secara taktis.

Ia juga mengingatkan bahwa perang ini dapat memicu ekstremisme dan radikalisme berbasis identitas. Menurutnya, para pemimpin dunia cukup menyadari risiko ini, dan ia mengapresiasi tindakan evakuasi WNI yang dilakukan pemerintah.

“Saya sempat mengeluarkan statement juga bahwa untuk evakuasi WNI yang ada di Iran itu sangat penting. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini saya hanya melihat dari statement-nya Bapak Prabowo yang beredar luas di TikTok dan menjadi viral,” katanya.

ahk,gal/rdn



FOTO: DOK/PT

Anggota Komisi I Nurul Arifin.



Perlu Penyusunan Baru UU Kehutanan

Anggota Komisi IV DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan perlunya penyusunan Undang-Undang Kehutanan yang baru, menggantikan regulasi yang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Revisi UU Kehutanan yang tengah digelar oleh Komisi IV DPR RI.

“UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ini menurut saya sudah kedaluwarsa. Tidak lagi sesuai dengan tuntutan kekinian. Maka kami sepakat bahwa bukan sekadar revisi, tapi perlu disusun undang-undang baru yang benar-benar menjawab kebutuhan saat ini,” ujarnya dalam RDPU Revisi UU Kehutanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

Ia menekankan bahwa proses penyusunan undang-undang baru tersebut memerlukan waktu yang panjang, mengingat pentingnya menampung seluruh aspirasi dan

kepentingan para *Stakeholder*. “Hari ini kami baru mulai mendengarkan berbagai masukan dari *Stakeholder*, seperti Perhutani dan kelompok konsultan. Semua akan kami rangkum dan bahas secara mendalam dalam rapat-rapat selanjutnya,” jelas legislator dari Dapil Bali itu.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi kawasan hutan yang kian memprihatinkan dan tidak tertangani secara optimal karena

Hari ini kami baru mulai mendengarkan berbagai masukan dari *Stakeholder*, seperti Perhutani dan kelompok konsultan. Semua akan kami rangkum dan bahas secara mendalam dalam rapat-rapat selanjutnya

lemahnya daya jangkau regulasi saat ini. “Kita semua bisa melihat secara kasat mata bagaimana carut-marut pengelolaan hutan kita. Undang-undangnya ada, tapi sudah tidak relevan lagi. Maka Komisi IV berkomitmen menyusun undang-undang yang benar-benar mampu menjawab tantangan pengelolaan hutan ke depan,” tegasnya.

—rth,gal/rdn

Anggota Komisi IV DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama dalam RDPU Revisi UU Kehutanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/06/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



Bela Supir Truk ODOL



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw di sela-sela kunjungan Komisi V di Cilegon, Banten, Kamis (26/6/2025).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 terkait Jalan, khususnya menyangkut persoalan kendaraan *over dimension and overloading* (ODOL). Hal ini terkait dengan penindakan yang selama ini dianggap tidak adil kepada para sopir truk. Hal ini disampaikannya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Ruas Tol Jakarta-Tangerang-Merak di Cilegon, Banten, dalam rangka meninjau langsung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.

Dalam pernyataannya, Roberth menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib para sopir truk

yang kerap menjadi pihak yang disalahkan dalam pelanggaran ODOL, padahal mereka hanya

menjalankan tugas. “Saya terus terang. Teman-teman para sopir truk, kita tidak sebut sopir ODOL, karena kasihan. Mereka itu cuma pekerja. Mereka hanya menjalankan perintah. Beban muatan itu ditentukan oleh pemilik barang, bukan kemauan sopir,” ujar Roberth di sela-sela kunjungan Komisi V di Cilegon, Banten, Kamis (26/6).

Ia menyoroti bahwa dalam aturan yang berlaku saat ini, beban tanggung jawab hukum justru ditimpakan kepada sopir, termasuk sanksi denda yang dinilai memberatkan. “Bayangkan, sopir yang cuma cari makan, bisa dikenakan sanksi Rp500 ribu. Ini tidak adil. Harusnya yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dan pemilik kendaraan. Itu yang harus kena sanksi,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Roberth menilai penanganan ODOL tidak cukup hanya mengandalkan sanksi di lapangan, tetapi perlu sistem pencegahan berbasis teknologi. Ia mengapresiasi langkah pengelola jalan tol yang telah mulai memasang sistem *Weight In Motion* (WIM), yaitu alat pendeteksi beban kendaraan otomatis, di titik-titik tertentu.

we/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Jangkar Baru Perekonomian Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kebangkitan koperasi terutama Koperasi Desa Merah Putih, merupakan elemen kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Menurutnya, koperasi harus menjadi lembaga utama yang menopang berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

“Kita tidak menganut ekonomi sosialis atau liberal, melainkan ekonomi kekeluargaan. Maka, koperasi adalah jawabannya, sesuai konstitusi kita, UUD 1945,” ujar Herman dalam agenda Forum Legislasi dengan tema ‘RUU Perkoperasian Perkuat Peran Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi’ di Gedung Nusantara I, DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Dirinya menyebut koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga wadah sosial yang mampu menggerakkan potensi desa. Ia menyinggung peran koperasi unit desa (KUD) pada era Orde Baru yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa.

Meski pernah mengalami kegagalan pada era reformasi, menurutnya hal itu seharusnya menjadi pelajaran, bukan alasan

untuk menolak gagasan besar koperasi saat ini. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya peran koperasi dalam program MBG yang menasar 82,9 juta penerima.

Perlu diketahui, program ini diproyeksikan membutuhkan 30.000 dapur umum dengan kebutuhan logistik harian yang sangat besar, seperti 82,9 juta butir telur dan ribuan ton beras. Guna memenuhi kebutuhan itu secara berkeadilan dan merata, ia menekankan perlunya lembaga lokal seperti koperasi yang dapat menjadi mata rantai pendek antara petani dan konsumen akhir.

“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, program MBG justru akan dimanfaatkan konglomerat. Maka, koperasi desa harus jadi motor yang menyuplai kebutuhan ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

—um/rdn

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, dalam agenda Forum Legislasi di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).



FOTO: MRO/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Penguatan Anggaran Bagi Ekonomi Kreatif



Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief di sela-sela Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2025).

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mendorong penguatan anggaran bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Pasalnya, keterbatasan anggaran menjadi hambatan nyata bagi Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memaksimalkan program-program untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ia juga menyoroti masih adanya anggaran yang diblokir. Karena itu, ia mendorong agar anggaran tersebut segera dibuka bahkan ditingkatkan.

“Dari empat kementerian yang menjadi mitra Komisi VII, Kementerian Ekonomi Kreatif justru mendapat anggaran yang

paling kecil. Padahal semangat dan programnya sangat potensial. Maka kami siap mendorong penambahan anggaran, tentu dengan dasar argumentasi dan bukti dampak yang kuat,” tegas Hendry kepada *Parlementaria* di sela-sela Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).

Lebih lanjut, Hendry mendorong agar pembangunan sektor ekonomi kreatif dilakukan secara lintas sektor, salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan sektor pariwisata. Ia mengibaratkan pariwisata sebagai lokomotif dan ekonomi kreatif sebagai gerbongnya.

“Dahulu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih menjadi satu. Sekarang terpisah, padahal keduanya sangat berkaitan. Kalau mampu dikolaborasikan dengan baik, hasilnya akan luar biasa,” ungkapnya.

Maka dari itu, menurutnya penting bagi Kementerian Ekonomi Kreatif untuk fokus pada program pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang telah berjalan. Hal itu agar pelaku ekonomi kreatif depan dapat dijadikan *role model*. Dengan begitu, akan terbentuk argumen yang kuat saat memperjuangkan peningkatan anggaran bagi kementerian tersebut. — **hal/rdn**



Tingkatkan Kompetensi Guru dan Kepsek



DPR RI dan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program, termasuk alokasi anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Inisiatif ini guna mendorong peningkatan kompetensi guru di seluruh Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan,

Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian di
Gedung Nusantara I, DPR
RI, Senayan, Jakarta,
Kamis (26/6/2025).

peningkatan kompetensi guru akan dilakukan salah satunya dengan mendorong guru menyelesaikan studi strata 1 (S1) dan diploma (D4) melalui bantuan pendidikan lanjut kuliah. "Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk bisa menyelesaikan studi S1 dan D4 dengan anggaran dari APBN sepenuhnya," jelasnya kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6).

Selain kepada guru, peningkatan kompetensi juga menyasar kepala sekolah. kepala sekolah nantinya akan menjalani berbagai proses pelatihan agar lebih kompeten dalam memimpin satuan pendidikan. "Nanti Insya Allah ada anggaran dari kita untuk melatih kepala sekolah selama beberapa

**Kita sudah
alokasikan
anggaran untuk bisa
menyelesaikan studi
S1 dan D4 dengan
anggaran dari APBN
sepenuhnya**

bulan supaya mereka semua kompeten sebagai pemimpin di satuan pendidikan," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sementara itu, program digitalisasi di semua sekolah juga akan dilakukan bertahap. "Apa yang Pak Prabowo arahkan ada digitalisasi di semua sekolah itu secara bertahap sedang dilaksanakan," tandasnya.

bia/rdn



FOTO: MRI/PDT

Waspadai Lonjakan ICP Akibat Konflik Iran-Israel

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti risiko gejolak harga minyak global akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel serta

keterlibatan Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah agar harga minyak Indonesia (ICP) tidak melampaui asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar per

barel, demi menjaga kestabilan subsidi energi dan fiskal nasional.

"ICP dalam APBN 2025 dipatok sebesar 82 dolar per barel. Saat ini harga minyak masih di bawah angka itu, berkisar di 75 hingga 79 dolar. Artinya, dari sisi harga, kita masih sangat aman. Namun jika konflik terus berlanjut dan harga melampaui batas asumsi, maka kita harus bersiap dengan skenario pengurangan subsidi BBM dan skema kompensasi bagi masyarakat miskin," ujar Misbakhun dalam diskusi virtual bersama INDEF di Jakarta, Minggu (29/6).

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini tercatat sebesar 4,87 persen, sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Penurunan ini terjadi bahkan sebelum konflik Iran-Israel meletus, dan sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian dagang Amerika Serikat yang disebutnya sebagai "Trump 2.0".

"Koreksi pertumbuhan ini sudah terlihat sebelum konflik. IMF dan Bank Dunia juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Maka dari itu, kita harus antisipatif terhadap risiko fiskal dan inflasi sejak dini," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, pendapatan negara dari sektor perpajakan maupun non-pajak masih tergolong aman. Pemerintah juga belum perlu melakukan pembiayaan baru selama harga ICP masih terkendali. Namun jika harga minyak global melonjak, maka inflasi dan tekanan fiskal dapat meningkat secara signifikan.

rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ketua Komisi XI DPR RI
Muhammad Misbakhun.

FOTO: DOK/PDT



Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas saat kunker reses Komisi XIII DPR ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, baru-baru ini.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mengungkapkan keprihatinannya terhadap proses penerbitan empat IUP baru di wilayah Raja Ampat. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan evaluasi perizinan tambang secara menyeluruh.

“Sampai saat ini saya terus mendorong agar dilakukan proses penegakan hukum. Apalagi lokasi-lokasi yang diterbitkan izinnya itu merupakan kawasan geopark dan hutan lindung, yang seharusnya tunduk pada aturan ketat,” ujar Yan Permenas Mandenas dalam keterangan video resmi kepada **Parlementaria** usai kunker reses Komisi XIII DPR ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, baru-baru ini.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mempertanyakan prosedur administrasi penerbitan izin tersebut dan meminta agar dilakukan audit menyeluruh

Penguatan HAM di Raja Ampat

terhadap proses perizinan dan dokumen amdal yang menjadi dasar keluarnya izin tambang tersebut. “Kalau memang ada pelanggaran prosedur, maka proses hukum harus dijalankan secara transparan untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Mendorong agar dilakukan proses penegakan hukum. Apalagi lokasi-lokasi yang diterbitkan izinnya itu merupakan kawasan geopark dan hutan lindung

Lebih lanjut, Yan Permenas Mandenas menyatakan bahwa evaluasi telah dimulai dengan pencabutan empat IUP. Namun, tahapan selanjutnya harus melibatkan audit lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia juga mendorong agar hasil audit tersebut dipaparkan secara terbuka, termasuk ke Komisi teknis terkait di DPR.

Dalam kunjungan ini, Komisi XIII secara khusus menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat lokal.

pun/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kawal Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita



FOTO: HNM/PDT

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso bersama tim dalam foto bersama saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (19/6/2025).

Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan memberikan perhatian khusus terhadap isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tersebut yang belakangan ini menjadi sorotan nasional. Salah satu kasus yang menimbulkan keprihatinan mendalam yaitu pembunuhan terhadap seorang jurnalis perempuan bernama Juwita yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AL.

“Kasus ini tidak hanya mengguncang komunitas pers dan masyarakat sipil di Kalimantan

Selatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pekerja media serta perlindungan terhadap perempuan di ruang publik,” jelas Sugiat kepada **Parlementaria** usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII ke Banjarbaru, Provinsi Kalimantan, Kamis (19/6).

Di samping itu, dalam pertemuan pun, Komisi XIII meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk menyampaikan hasil pemantauan terhadap kasus dugaan kekerasan terhadap jurnalis tersebut, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AL.

“Tentu dalam hal ini kami

(Komisi XIII) menyatakan keprihatinan dan dukungan terhadap proses pemantauan dan penegakan hukum serta mendukung langkah-langkah Komnas HAM dalam mengawal kasus ini, dan mendorong proses hukum yang transparan, berkeadilan, serta memperhatikan aspek kekerasan berbasis gender,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, Komisi XIII menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan kualitas layanan publik di sektor hukum dan HAM, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. **hnm/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Baleg Bahas RUU PPRT

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI A Iman Sukri menegaskan

bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus memberikan perlindungan hukum atas hubungan kerja antara pemberi kerja, penyalur, dan pekerja rumah tangga (PRT). Ia mengatakan Baleg DPR RI terbuka kepada seluruh pihak terkait dalam pembahasan RUU PPRT guna mencapai hasil yang komprehensif terhadap peran penting pekerja rumah tangga dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus memberikan perlindungan hukum atas hubungan kerja antara pemberi kerja, penyalur, dan pekerja rumah tangga (PRT).

“Pembahasan RUU PPRT menjadi komitmen Baleg agar menghasilkan produk legislasi yang bermanfaat bagi ART, karena memang hampir semua masyarakat memiliki ART yang belum mempunyai perlindungan hukum yang kuat,” imbuhnya saat Rapat Pleno RUU PPRT di Gedung DPR, Senin (26/5).

Terkait penyusunan RUU, ia berharap pembahasan dapat segera diselesaikan sesuai komitmen Presiden dalam waktu tiga hingga empat bulan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan legislasi.

Ia memastikan bahwa Baleg DPR RI terbuka terhadap masukan publik dan akan terus memperluas ruang partisipasi masyarakat. Ia bahkan mengusulkan pelaksanaan dialog publik di lingkungan terbuka.

“Intinya kami di Baleg terbuka dengan seluruh pihak yang mau memberikan masukan dan aspirasi terkait RUU PPRT ini,” tuturnya. — **tn/aha**

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI A Iman Sukri saat Rapat Pleno RUU PPRT di Gedung DPR, Senin (26/5/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: JKA/PDT

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah asosiasi industri tekstil di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan yang menjerat industri tekstil nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah asosiasi industri tekstil ini, Firman memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPR melalui Baleg yang menggagas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertekstilan.

“Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan Baleg karena akhirnya menginisiasi RUU Pertekstilan ini. RUU ini sudah lama kami sampaikan ke pemerintah, tapi respons yang lambat justru menyebabkan kehancuran dunia tekstil kita,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).

Firman menyebut bahwa Indonesia dulunya adalah salah satu negara unggulan dalam industri tekstil, baik untuk ekspor

Pemerintah Lamban Respons Krisis Industri Tekstil

maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun, minimnya perlindungan dan regulasi membuat industri ini terpuruk, terutama akibat serbuan impor murah dan maraknya impor ilegal.

“Kebijakan paling menyakitkan adalah ketika kontainer-kontainer dibuka di Bea Cukai dan tengah malam langsung dikeluarkan. Entah ada kepentingan apa. Inilah titik awal kehancuran industri tekstil nasional kita,” tegas Firman.

Ia menyoroti lemahnya pengawasan negara terhadap

impor ilegal yang merugikan produsen dalam negeri.

Menurutnya, ini merupakan bentuk nyata pembiaran oleh negara terhadap sektor yang seharusnya bisa menjadi andalan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, Firman tetap optimistis terhadap masa depan industri tekstil Indonesia. Ia menekankan bahwa masih terdapat peluang besar, termasuk pertumbuhan signifikan di beberapa segmen seperti pakaian jadi dan alas kaki. **we**





Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memimpin kunjungan kerja ke Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Dalam kunjungan ini, Komisi II menegaskan pentingnya peran ANRI dalam menjaga ingatan kolektif dan warisan sejarah bangsa. Foto: MUN/AHA





DARI RUANG SIDANG

TAYANG SETIAP HARI

SAKSIKAN HANYA DI:

<https://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID>



TVR PARLEMEN

TVR
PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri